

SKRIPSI

WAHJOE POERNOMO SOEPRAPTO

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD1945:

**SUATU TELAAH ATAS PERANAN LEMBAGA
WAKIL PRESIDEN DI MASA MENDATANG
LEWAT TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF DAN
PRAKTEK KETATANEGARAAN**

KK

Tat 08 /02

Soe

lk



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

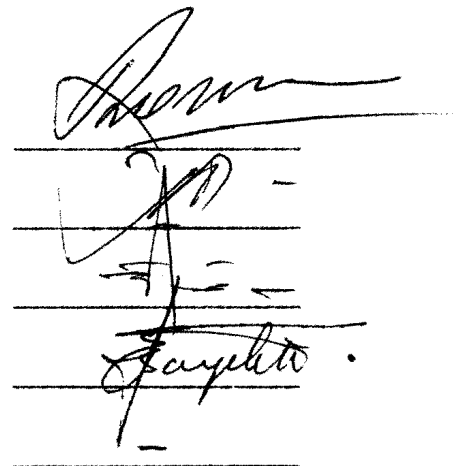
2002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan diterima untuk
memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Tanggal 1 Agustus 2002**

Tim Penguji :

- 1. Hj. Romlah Sartono, S.H., MS (Ketua)**
- 2. Sukardi, S.H., M.H. (Anggota)**
- 3. Himawan Estu Bagiyo, S.H., M.Hum (Anggota)**
- 4. Endang Sayekti, S.H., M. Hum (Anggota)**
- 5. Udin, S.H. (Anggota)**



Handwritten signatures of the five members of the Thesis Examination Team, each on a horizontal line.

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945:

SUATU TELAAH ATAS PERANAN LEMBAGA WAKIL PRESIDEN DI MASA MENDATANG LEWAT TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF DAN PRAKTEK KETATANEGARAAN



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas akademi
Dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

**Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 131 855 885**

Disusun Oleh

**Wahjoe Poernomo Soeprapto
NIM. 039814724**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan mengenai kedudukan Wakil Presiden di muka, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan kedudukan Wakil Presiden sejak masa Presiden Soekarno sampai pada perkembangan terakhir yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat dikatakan tidak mengalami perubahan sama sekali. Artinya Wakil Presiden bertugas membantu Presiden. Untuk seberapa besar dan dalam bidang apa saja pembantuannya, tidaklah disebut disana. Begitu pula baik dalam sidang BPUPKI dan PPKI pun para *founding father* tidak banyak melakukan pembahasan, utamanya dalam menjelaskan hubungan pembantuan Wakil Presiden terhadap Presiden. Hanya dinamika dalam prakteknyalah yang berubah. Dikatakan dinamika karena pada dasarnya terdapat pasang surut peran Wakil Presiden, ada kalanya peran Wakil Presiden cukup besar tetapi sering pula kita lihat bahwa kemudian perannya melemah atau bahkan pernah ditiadakan.

Adanya pengurangan peran MPR pada UUD 1945 Perubahan Ketiga ternyata berimplikasi terhadap pemilihan dan pemberhentian jabatan Presiden (dan Wakil Presiden). Jika sebelum perubahan ketiga, praktek UUD 1945 menyandarkan pemilihan dan pemberhentian jabatan Presiden (dan/atau

Wakil Presiden) pada otoritas MPR, semisal dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973, No. III/MPR/1978 jo. No. VI/MPR/1973, maka seiring dengan tuntutan akan pengurangan peran MPR, baik pemilihan maupun pemberhentian jabatan Presiden dirumuskan secara jelas dalam konstitusi, yaitu dipilih langsung oleh rakyat dan yang memeriksa, mengadili, dan memutus usul pemberhentian itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Langkah perubahan terhadap UUD 1945 itu penulis nilai cukup mendasar pada kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dan masa mendatang, yaitu setelah penulis membandingkan antara UUD 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat (*The Constitution of the United States: CUS*) dengan menggunakan dua indikator yang penulis kemukakan yaitu pertama konsep kekuasaan meliputi hubungan antar lembaga negara dan konstituensi, serta yang kedua adalah sistem pemerintahan akan terlihat dengan jelas titik-titik kelemahan dari kedudukan Presiden dibawah UUD 1945 yang bercorak quasi parlementer atau quasi presidensiil itu. Penulis juga menilai bahwa arah perubahan UUD 1945 berkiblat pada Konstitusi Amerika, yang tentunya, dengan “gaya Indonesia”.

Meskipun terdapat perumusan yang jelas dalam konstitusi mengenai kedudukan Presiden penulis mengindikasikan ada beberapa celah kekurangan pada UUD 1945 Perubahan Ketiga, hal itu adalah:

- a. *tidak ada mekanisme pertanggungjawaban jabatan Presiden dan Wakil Presiden*

Pendapat ini mendasarkan diri bahwa setiap jabatan publik sudah selayaknya dilekati dengan pertanggungjawaban, dan hal ini tidak sekali-kali dimaksudkan mengembalikan konteks pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Karena, betatapun juga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

- b. tidak ada pembagian tugas yang jelas antara Presiden dan Wakil Presiden*

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara kedua jabatan itu diharapkan dapat meminimalisasi potensi konflik antara keduanya. Juga perlu dipikirkan kemungkinan bahwa ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dapat menjadi alasan bagi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar secepatnya mengadakan perubahan pengaturan mengenai kedudukan Wakil Presiden ini dalam konstitusi (UUD 1945) dengan jalan merubah ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan Wakil Presiden yang selama ini hanya diatur secara sederhana itu.

Kemudian yang kedua, dilatarbelakangi kasus kejatuhan Presiden Gus Dur, hendaknya diadakan pengaturan tentang larangan perangkapan jabatan publik dengan jabatan partai politik. Hal ni dilakukan agar setidaknya

mengurangi potensi untuk mengulangi kesalahan.

Sedangkan dalam hal hubungan Presiden dan Wakil Presiden penulis mengusulkan:

dalam hal kekuasaan pemerintahan (eksekutif):

Menurut penulis, pembagian prioritas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 121/2000 bisa diterapkan. Sebagai misal, dalam keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Presiden melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden cukup membantu melakukan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang dikhususkan pada pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari yang meliputi:

- a. menyusun program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintahan;
- b. memimpin sidang kabinet, menyimpulkan hasilnya dan menjelaskannya untuk diketahui oleh seluruh rakyat;
- c. memberi pengarahan dan petunjuk kepada para anggota kabinet;
- d. memantau, mengawasi, dan menilai kinerja para anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kerja kabinet;
- e. melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk memperlancar tugas penyelenggaraan pemerintahan;

- f. mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pertanggungjawaban kekuasaan Wakil Presiden diatas sudah saatnya diatur dalam konstitusi.

dalam hal Kekuasaan Kenegaraan (Wakil Presiden):

Konteks perubahan terhadap beberapa pasal mengenai kekuasaan Kepala Negara (baca: Pasal 11, 13, 14, dan 15 UUD 1945) mengindikasikan adanya mekanisme kontrol lembaga-lembaga negara seperti DPR dan Mahkamah Agung (MA) terhadap kekuasaan Kepala Negara ini. Sehingga, menurut penulis, apabila Wakil Presiden sebagai Wakil Kepala Negara juga dispesifikkan kekuasaannya sebagaimana yang disarankan dalam hal kekuasaan pemerintahan (eksekutif) diatas, maka kekuasaan Wakil Kepala Negara menjadi kurang efektif.

Jadi dengan demikian, penulis sepakat dengan konteks perubahan pasal 11, 13, 14 dan 15 UUD 1945 dan tidak perlu diadakan spesifikasi terhadap kekuasaan Wakil Kepala Negara.